

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah. *Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*. Gowa: Gunadarma Ilmu, 2018.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkaâmus-sulthaâniyyah wal wilayatud-diniyyah*. Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1996.
- al-Kattani, Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Atmadja, I Dewa Gede, dkk. *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2015.
- Araf, Al. *Pembubaran Ormas: Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia (1945-2018)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2022.
- Ashiddiqie, Jimmly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Hayy, Abdul. 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*. Penerjemah Muhammad Miscbah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Tt.
- H. A. Djazuli. *Fiqh Siyâsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003.
- Isharyanto. *Politik Hukum*. Surakarta: Kekata Grup, 2016.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyâsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Tt.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*. Al-Qahirah: Dar Al Anshar, 1977.
- Kusumastuti, Dora. *Negara, HAM dan Demokrasi*. Jakarta: UNISRI Press. 2020.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- MD, Moh. Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Marzuki, Suparman. *Tragedi Politik Hukum HAM*. Yogyakarta: Pustaka

- Pelajar, 2011.
- Maududi, Abul A'la. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Bandung: Pustaka, 1976.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Jogjakarta: EA Books, 2022.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sibuea, Hotma Pardomuan. *Politik Hukum*. Jakarta: Krakatau Book, 2010.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Tt.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Serlika dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018.
- Zain, Baddudu. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

## **B. Jurnal dan Skripsi**

- Abdul Rochim & Muhammad Andri, "Peran Organisasi Masyarakat Sebagai Mitra Dan Kontrol Pemerintah Terhadap Hak-Hak Demokrasi Berdasarkan UU NO 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan", *Justicia Journal*, 01: 07 (Agustus 2018).
- Alfaruqi, Daniel "Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* 4:1 (April 2017).
- Catur Wibowo dan Herman Harefa, "Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah". *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 7, no. 1 (December 21, 2015): 1-20.
- Fitriana, Mia Kusuma. "Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (*Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country's Goal*).". *Jurnal Legislasi Indonesia* 2:12 (Juni 2015): 1-27.
- Fahmi, Nurul Huda. "Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Masyarakat Kota Bandung Melalui Program Jamboree Kebangsaan." *Skripsi*, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 2021.

- Fitriana, Mia Kusuma. “Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (*Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country’s Goal*).” *Jurnal Legislasi Indonesia* 2:12 (Juni 2015): 1-27.
- Fahmi, Nurul Huda. “Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Masyarakat Kota Bandung Melalui Program Jamboree Kebangsaan.” *Skripsi*, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 2021.
- Ismail, Gusnar. “Implementasi Otonomi Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19”, *Jurnal Lemhanas RI* 8:3,
- Juwita, Tri Utami, “Peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung Dalam Berpartisipasi Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Tinjauan Fiqh Siyāsah)”. *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Mardika, Repansah, “Politik Hukum Kebijakan Pemerintah Terhadap Larangan Ormas FPI (Front Pembela Islam) Di Indonesia Perspektif Siyāsah Syar’iyyah”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Suhardjana, Johannes. “Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara.” *Jurnal Dinamika Hukum* 10. 3 (September 2010): 257-269.
- Simamora, Janpatar. “Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Jurnal Dinamika Hukum*, 14.3 (2014): 551.
- Syarir, Rozi, “Organisasi Masyarakat di Indonesia Perspektif Siyāsah Syari’iyyah.” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Safri, Hendra. “Manajemen dan Organisasi Dalam Pandangan Islam”, *Kelola: Journal of Islamic Education Management* 2:2 (oktober 2017).
- Sopiani & Zainal Mubaroq. “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* 2: 17 (Juni 2020).

Anggoro, Syahriza Alkohir, "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan", *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10: 01 (Juni 2019).

Syafuri, B. Membangun Demokrasi dan Perlindungan HAM. *Al Qisthâs; Jurnal Hukum dan Politik*. 9:2 (September 2018): 1-30.

Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Hukum* 30:1 ( Februari 2014): 26-53.

### **C. Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang pengesahan terhadap Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Walikota Cirebon Nomor 38 tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon.

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 105 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon.

### **D. Website:**

Kota Cirebon, Badan Kesbangpol. "Sejarah dan Perkembangan."

<https://kesbangpol.cirebonkota.go.id/?p=76> (diakses tanggal 17 November 2022).

<https://dkpp.go.id/warga-indonesia-mengenal-organisasi-lebih-dulu-dibanding-eropa/> (diakses tanggal 3 Juni 2023).

<https://muslim.or.id/21379-hukum-organisasi-dan-taat-pada-pimpinan-organisasi.html> (diakses tanggal 3 Juni 2023).

<https://islam.nu.or.id/syariah/hikmah-di-balik-adanya-hukum-mubah->  
(diakses tanggal 3 Juni 2023).

<https://www.nu.or.id/daerah/cara-berorganisasi-nabi-muhammad-saw-adalah-mendahulukan-kepentingan-umat-Cx39K> (diakses tanggal 3 Juni 2023).

<https://radarcirebon.id/tidak-coret-kesbangpol/> (diakses tanggal 20 Maret 2023).

<https://cirebonpos.com/2018/11/12/lebih-dekat-dengan-visi-dan-program-sehati-ala-azis-eti/> (diakses tanggal 4 Juni 2023).

<https://bappeda.cirebonkota.go.id/?p=4609> (diakses tanggal 1 Juni 2023).

<https://jabar.times.co.id/news/berita/9bszahgoux/penyesuaian-di-masa-pandemi-covid19-rpjmd-kota-cirebon-alami-perubahan> (diakses tanggal 4 Juni 2023).

<https://cirebon.inews.id/read/131029/ormas-kota-cirebon-deklarasi-anti-radikalisme-siap-jaga-nkri> (diakses 5 Juni 2023).

